

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi memiliki keunggulan tersendiri, sebab di dalam negara yang demokratis tersebut masyarakatnya dapat menyampaikan aspirasinya dengan bebas, sehingga pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakannya mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokratis memiliki peranan yang sangat penting, salah satunya peranan masyarakat dalam proses penentuan badan eksekutif dan legislatif baik dipemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena masyarakat menjadi faktor utama dan penentu dalam pelaksanaan pemilu. Menurut Bachtiar (2014) Pemilu sendiri merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi, dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan.

Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa pemilu sendiri tidak hanya dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan badan eksekutif dipusat tetapi juga didaerah yang dilaksanakan untuk memilih kepala daerahnya secara langsung. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Tip O'Neill dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa *'all politics is local'* yang dapat dimaknai sebagai demokrasi di tingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila

tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dahulu terbentuk. Ini artinya kebangkitan demokrasi politik di Indonesia (secara ideal dan aktual) diawali dengan Pilkada langsung. (Leo Agustino, 2009)

Sejak diterbitkannya UU nomor 23 tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung, maka partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas pemilihan kepala daerah tersebut sangat penting sebab partisipasi tersebut akan menentukan masa depan mereka selama lima taun kedepan. Partisipasi politik menurut Hungtinton dan Joan Nelson (1994:5) adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (action) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah. Serupa dengan apa yang diterangkan oleh Hungtinton dan Joan Nelson, Rasinski dan Tyler (198:110), sewindu sebelumnya pun telah menguraikan bahwa inti dari partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Dalam konteks pilkada, partisipasi politik masyarakat saat pemilihan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan semua itu, maka masyarakat diminta untuk memilih calon-calon yang ada dengan merujuk pada program kegiatan yang ditawarkan oleh para calon pada saat mereka berkampanye. Apabila program kerja yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat tentu saja akan menjadi pemikat tersendiri untuk masyarakat agar memilih calon tersebut, namun masalahnya adalah ketika

program kerja yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah tersebut tidak sesuai dengan harapan atau tidak mampu menarik perhatian masyarakat maka akan menimbulkan dampak ketidakpastian pemilih apakah harus memilih yang ada saja atau bahkan lebih baik tidak memilih (Golput). Menurut Ramlan Surbakti golongan putih atau disebut juga "*No voting Decision*" adalah orang yang secara sadar dan sengaja mengambil sikap tidak memberikan suara dalam pemilihan umum dan juga disebabkan oleh kesalahan administratif serta faktor teknis.

Menurut Arbi Sanit dalam bukunya yang berjudul *Golput : aneka pandangan fenomena politik* mengatakan bahwa munculnya golongan putih tersebut dikarenakan ketidakpuasaan terhadap kandidat yang hendak dipilih yang akhirnya sebagian masyarakat memilih untuk tidak golput. Menurutnya golput adalah suatu gerakan moral untuk menegakkan prinsip demokrasi dan hak-hak asasi rakyat.

Meskipun tidak ada larangan yang melarang masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya apalagi jika yang termasuk kedalam golongan putih itu hanya sebagian kecil saja maka hal tersebut tidak akan menimbulkan pengaruh yang signifikan. Namun yang menjadi persoalannya apabila yang termasuk kedalam golongan putih tersebut dengan jumlah yang cenderung besar, hal tersebut tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas, apabila tindakan golput semakin tinggi maka akan berdampak pada setiap kegiatan pilkada karena akan mempengaruhi hasil dari pemilu itu sendiri. Golput akan dapat melumpuhkan demokrasi, karena

merosotnya kredibilitas negara terutama kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik. Selain itu juga pilihan untuk tidak menggunakan hak pilihnya merupakan bentuk pemborosan Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah, sebab kertas suara dan fasilitas lainnya telah dipersiapkan sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat namun pada saatnya pemilu dilaksanakan fasilitas yang telah dipersiapkan sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tersebut tidak dipergunakan semua. Selain itu tindakan golput juga dapat memancing tindakan yang kurang jujur, misalnya seperti surat suara yang tidak digunakan disalahgunakan untuk kemudian dicoblos oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan salah satu calon. Selain itu akan berpengaruh pada calon pemimpin yang terpilih nantinya, seperti contoh kasusnya ketika ada pasangan calon tunggal yang mencalonkan menjadi kepala daerah, apabila kita tidak memilih karena tidak peduli atau tidak cocok kepada calon tersebut justru tindakan tersebut sangat salah, dengan kita tidak memilih maka akan menguntungkan pasangan calon tunggal tersebut, tetapi jika kita menggunakan hak pilih kita maka kita dapat memilih untuk menyatakan tidak setuju, dan apabila yang tidak setuju cukup banyak pemilihan kepala daerah tersebut dapat dinyatakan gagal. Kemudian dengan memilih golput juga kita mau tidak mau harus menerima kinerja pemimpin yang terpilih meskipun kinerjanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan.

Menurut salah satu kabar berita online *jawaPos.com* (28/06/2018, 12:20 WIB) mengatakan bahwa :

Angka golput diprediksi masih tinggi. Indikasinya, tingkat kehadiran pemilih masih tergolong rendah. Bahkan, di sejumlah daerah, kehadiran pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS) tak sampai 60%.

Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, tingkat partisipasi pemilih tergolong rendah. Salah satunya yang disampaikan lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Menurut lembaga tersebut, partisipasi di berbagai daerah yang menggelar pilkada tidak bisa disebut tinggi.

Di Jawa Timur misalnya, partisipasi pemilih hanya ada di angka 62,23% dengan margin of error 1,33%. Demikian juga halnya di Jabar (67,83%) dan Sumatera Utara (68,54 %). Ada juga yang masih lumayan seperti di Sulawesi Selatan (74,43%). "Dengan margin of error yang ada, target KPU sulit terpenuhi," kata Direktur Riset Indikator Politik Indonesia Mohammad, Adam Kamil.

Berdasarkan berita diatas maka dapat kita lihat tingkat golput pada tahun 2018 ini dapat dikatakan cenderung tinggi seperti di jawa barat sendiri partisipasi pemilihnya hanya sampai dengan 67,83%, hal tersebut tentu saja perlu perhatian lebih dari pemerintah, sebab apabila tingkat golput semakin tinggi akan memberi pengaruh yang signifikan pada kegiatan Pilkada. Seperti salah satu contohnya golput di Desa Sukasenang Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis pada pilkada 2018. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa tingkat golput di Kecamatan Sindangkasih adalah 21,83% dan Desa Sukasenang sendiri merupakan desa dimana tingkat golputnya paling besar dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada di Kecamatan Sindangkasih . Berikut adalah data jumlah golput di tiap desa yang ada di Kecamatan Sindangkasih dalam bentuk tabel :

**Tabel 1 data jumlah golput setiap desa di Kecamatan
Sindangkasih tahun 2018**

No	DESA	HAK PILIH	JUMLAH	JUMLAH GOLPUT
1	SINDANGKASIH	Pemilih	6005	1124
		Pengguna Hak Pilih	4881	
2	GUNUNG CUPU	Pemilih	5387	1139
		Pengguna Hak Pilih	4248	
3	BUDIASIH	Pemilih	3342	775
		Pengguna Hak Pilih	2567	
4	BUDIHARJA	Pemilih	3108	729
		Pengguna Hak Pilih	2379	
5	SUKARAJA	Pemilih	3688	718
		Pengguna Hak Pilih	2970	
6	SUKAMANAHA	Pemilih	3522	805
		Pengguna Hak Pilih	2717	
7	SUKASENANG	Pemilih	4872	1214
		Pengguna Hak Pilih	3658	
8	SUKARESIK	Pemilih	3354	925
		Pengguna Hak Pilih	2429	
9	WANASIGRA	Pemilih	2632	410
		Pengguna Hak Pilih	2222	
JUMLAH				7839

Sumber : <https://kpu.go.id>

Menurut data awal yang peneliti dapatkan melalui wawancara bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Sukasenang lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya adalah dikarenakan salah satu faktor yakni karena kurangnya kesadaran masyarakat yang lebih memilih berangkat

bekerja diluar kota. Dapat dikatan bahwa masyarakat yang memilih untuk golput tersebut kurang memiliki kesadaran akan pentingnya menggunakan hak pilihnya.

Menurut Eko Wardiman (39 tahun) salah satu staff Desa Sukasenang menyebutkan bahwa :

“Desa Sukasenang sendiri merupakan Desa dimana angka Golputnya tergolong paling banyak dibandingkan di desa-desa lain yang berada di Kecamatan Sindangkasih. Dan sepengetahuan saya sih rata-rata hal tersebut karena mereka lebih memilih untuk berangkat bekerja, mereka kurang sadar akan pentingnya memilih mereka lebih mengutamakan pekerjaannya.”

Menurut pernyataan informan diatas penulis menemukan salahsatu faktor yang menyebabkan tindakan sebagian masyarakat di Desa Sukasenang Kecamatan Sindangkasih lebih memilih untuk golput yakni karena kurangnya kesadaran pada masyarakat tersebut akan pentingnya memilih, mereka seperti tidak peduli dan lebih memilih berangkat bekerja keluar kota mencari rezeki dibandingkan meluangkan waktu sebentar untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjadi pemimpin mereka selama lima tahun kedepan. berdasarkan data awal diatas penulis menjadi tertarik untuk mencari informasi apakah ada faktor-faktor selain faktor diatas mengingat jika melihat data diri setiap kandidat memiliki pengalaman yang cukup mendukung dan juga pendidikan yang memadai untuk menjadi pilihan masyarakat, serta penelitian ini akan lebih focus untuk mencari tahu apa alasan yang melatarbelakangi tindakan golput masyarakat di Desa Sukasenang tersebut. Sebelum itu berikut adalah data diri kandidat yang mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ciamis dalam bentuk tabel :

Tabel 2 Data diri kandidat calon Bupati dan wakil bupati**Ciamis**

NO	Nama	TTL	Partai pendukung	Karier	Pendidikan terakhir	Harta kekayaan
1	Oih Burhanudin	Ciamis, 10/06/1969	PDIP	-Anggota DPRD Ciamis fraksi PDIP -Ketua komisi 1 DPRD Ciamis Bidang Pemerintahan -Wakil Bupati Ciamis	SMK	Rp.2.310.346.563(2018)
2	Yana Diana Putra	Ciamis, 26/11/1976	Demokrat, PAN, PKS,PBB, Nasdem, Gerindra	-Anggota DPRD Ciamis 3 periode -Wakil ketua DPRD Ciamis	SMA	Rp.1.449.776.261 (2018)
3	Herdiat Sunarya	Kuningan, 10/10/1960	Demokrat, PAN, Gerindra, Nasdem, PKS, PBB	-Pjs Kepala Dinas di Pemerintahan Desa Panjalu -Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Ciamis -Sekda Ciamis	S2	Rp.9.932.355.917 (2018)
4	Iing Syam Arifin	Tasikmalaya, 26/05/1955	Golkar, PDIP, PPP, PKB, Hanura	-staf di Pemkot Bandung -Kasubag Evaluasi	S1	Rp.3.941.364.110 (2018)

				Bagian Pembanguna n Setda Ciamis -Bupati Ciamis		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Pikiran Rakyat

Melihat jabatan yang pernah diduduki oleh setiap kandidat dapat dikatakan bahwa kandidat-kandidat yang mencalonkan sebagai Bupati dan wakilnya adalah merupakan orang-orang yang telah berpengalaman didalam kancan politik dan tentunya sudah banyak dikenal oleh masyarakat, dan tentunya masyarakat sudah dapat melihat dan menilai bagaimana kualitas dan kemampuan yang dimiliki oleh kandidat-kandidat diatas, namun mengapa masih ada saja masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian maka golput di Desa Sukasenang Kecamatan Sindangkasih tersebut menarik perhatian penulis untuk menelitinya lebih dalam lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah **Mengapa Golput dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018 di Desa Sukasenang tinggi?**

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi dan menitikberatkan pada pembahasan mengenai :

1. Alasan yang melatarbelakangi tindakan golput masyarakat di Desa Sukaenang dalam Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2018.
2. Penyebab angka Golput masyarakat di Desa Sukasenang tinggi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Alasan yang melatarbelakangi tindakan golput masyarakat di Desa Sukasenang dalam pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2018.
2. Partisipasi masyarakat Desa Sukasenang dalam Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2018.

E. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian (Moleong, 2009: 93-94).

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah alasan yang melatarbelakangi tindakan Golput masyarakat di Desa Sukasenang dalam Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2018.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Golput dalam Pilkada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah agar dapat meminimalisir tindakan Golput dalam Pemilu selanjutnya.